

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban wilayah otonom serta membenahi sendiri pemerintahan dan keperluan wilayah tersebut pada aturan perundang-undangan Undang-Undang No.32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah. Terdapat tiga tujuan inti kegiatan otonomi daerah, yakni menaikkan kualitas, kesejahteraan setempat, kapasitas pelayanan publik, kemampuan penataan sumber daya dan menguatkan kawasan bagi publik dalam pembangunan. Tujuan yang mendorong adanya desentralisasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Mardiasmo,2009).

Undang-undang No.32 tahun 2004 Pasal 1 ayat (7), desentralisasi ialah pemberian tanggung jawab pemerintahan kepada Daerah Otonom untuk membuat aturan pemerintahan pada sistem Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi diharapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan wewenang yang diserahkan pemerintah pusat. Wewenang yang dimaksud berasal dari apresiasi masyarakat terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah (Rosidin,2015).

Penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi lebih mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah dipercaya mampu mewujudkan hal tersebut dikarenakan adanya otonomi dan desentralisasi yang membebaskan pengelola daerah untuk melancarkan kegiatan yang berhubungan Pertumbuhan Ekonomi seperti infrastruktur di daerah itu. Pemerintah pusat berharap pembangunan Pertumbuhan Ekonomi tersebut sesuai kepentingan daerah terutama penduduk di daerah itu sendiri.

Indikator lain yang berhubungan dengan Pertumbuhan Ekonomi ialah PAD. UU No. 32 tahun 2004 Pasal 157 huruf a, PAD yakni hasil dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan pada wilayah yang dipisahkan, dan PAD yang sah. PAD inilah menjadi bagian kemandirian yang dimiliki oleh daerah sebagai sumber pendanaan sendiri.

Selain PAD, sumber pendanaan yang dimiliki daerah yakni Dana Perimbangan yang salah satunya adalah DAK. DAK dipindahkan dari APBN kepada daerah dalam pembiayaan kegiatan desentralisasi untuk memberi latihan khusus atas dasar prioritas nasional (UU No. 32 tahun 2004). DAK membiayai investasi pengembangan infrastruktur dengan efisien yang lama. DAK mengakomodasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana dalam periode tertentu. Kebutuhan khusus yang tidak bisa diperkirakan misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, beberapa jenis investasi, pembangunan jalan di kawasan kecil, dan lain-lain.

Faktor yang kredibel ini Belanja Modal. Eksistensi perkiraan Belanja Modal yang berasal kontribusi pusat dan PAD memegang peranan penting, karena target pemanfaatan untuk memodali pembangunan sektor sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan jasa kepada penduduk. Belanja Modal berguna menaikkan Pertumbuhan Ekonomi menjadi persoalan guna manajemen keuangan daerah.

Masalah Belanja Modal diperkirakan tidak terealisasi dengan baik akan menghasilkan sisa dana disebut SiLPA.

Berdasarkan pasal 1 angka 31 Peraturan Pemerintahan No.58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 1 angka 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011, “SiLPA selisih lebih realisasi perolehan dan ejakulasi biaya selama satu periode anggaran”. SiLPA pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 ditetapkan “SiLPA tahun sebelumnya ialah pemasukan pembiayaan dipakai untuk menyembunyikan defisit anggaran apabila realisasi pemasukan lebih kecil dari realisasi belanja, menandai tindakan lanjutan atas beban belanja langsung, menandai keharusan lainnya yang sampai ujung tahun anggaran belum disiapkan”. SiLPA digunakan pada periode Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah, maka SiLPA bagian dari periode Anggaran Pemasukan Belanja dan Daerah.

Maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh PAD, DAK, dan SiLPA terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel moderating di Propinsi Sumatera Barat periode 2013-2017”**. Penelitian bertujuan untuk melihat seberapa besar variabel PAD,DAK,dan SiLPA mampu memberikan kontribusi atas Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Pengaruh**

#### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Soebagiyo (2007) pada riset Yesika Resianna Barimbing dan Ni Luh Karmini (2015) menceritakan kelajuan masyarakat dan kelajuan tingkatan kerja menjadikan faktor positif yang mempercepat kelajuan Ekonomi. Semakin besar tenaga kerja maka produksi melonjak.

Menurut brata (2004) dalam penelitian Rori dkk(2016) menceritakan PAD secara positif berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di wilayah, dan diriset Tambunan (2006) bahwa kelajuan PAD membawa peningkatan dalam Pertumbuhan Ekonomi daerah.

Menurut Widjaja (2007) dalam penelitian Kusumastuti (2012) menceritakan bahwa PAD merupakan aset dasar dalam pemerintah daerah, untuk mencapai pembangunan dana belanja daerah. PAD membentuk usaha memperkecil terikat dalam mendapatkan subsidi.

#### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Edy Susanto dan Marhamah (2016) dalam penelitiannya menyatakan DAK biaya dari pendapatan APBD yang di distribusikan dengan tujuan membantu investasi kegiatan khusus (Nurlan Darize, 2009). Adanya kenaikan DAK meningkatkan belanja daerah. Jika belanja naik diusahakan perekonomian daerah akan naik.

Menurut peneliti Santoso (2013) dalam penelitian Ni Wayan Ratna Dewi dan I Dewa Gede Dharma suputra (2017) membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut kusumawati (2012) menceritakan bahwa DAK dimanfaatkan untuk kegiatan ekspansi yang mendorong aktivitas perekonomian pembangunan daerah.

#### **Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

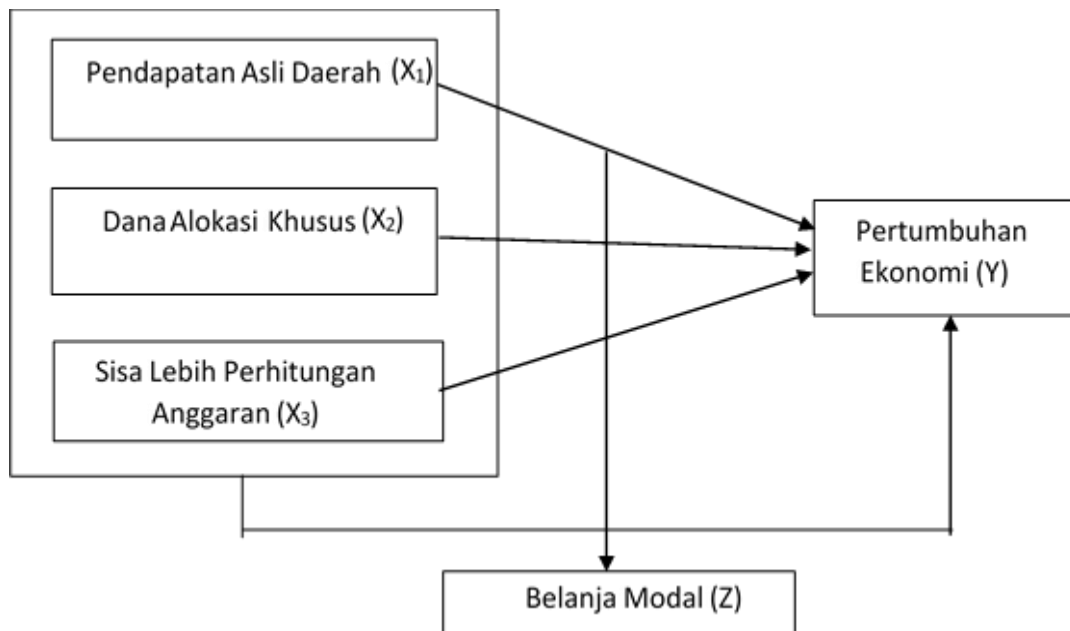
Tria Anindya Kirana (2016) dalam penelitian nya menyatakan perhitungan yang dibuat oleh pemerintah daerah acapkali selisih alhasil defisit, padahal kenyataannya sebagian pemerintah daerah yang berkebalikan, yaitu surplus. Dalam keadaan surplus disebut dana idel. SiLPA tahun berkenaan atau refleksi dana idel akan penghujung tahun anggaran SiLPA dari hasil yang melampaui prediksi yang lebih kecil. SiLPA tahun lampau diperoleh dari pembiayaan dipakai untuk melingkupi defisit taksiran jika realisasi hasil lebih kecil dari realisasi belanja, memodali latihan berikutnya atas beban belanja langsung dan keharusan lain hingga penghujung tahun anggaran yang belum kelar (Kusnandar dan Siswantoro, 2011).

## Pengaruh Belanja Modal sebagai variabel Pemoderasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sukarmi dan Budiasi (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa belanja modal sebagai moderator dapat memperkuat kapasitas finansial terhadap pertumbuhan ekonomi.

Linawati dkk (2018) yang menyatakan belanja modal dapat menjadi variabel moderator dari imbas bagi kapasitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

### Kerangka Konseptual



Gambar. Kerangka konseptual

### **Hipotesis Penelitian**

Rumusan hipotesis berlandaskan latar belakang penelitian dan kajian teori diatas adalah :

- Ha.1: PAD berdampak secara parsial atas Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Periode 2013-2017.
- Ha.2: DAK berdampak secara parsial atas Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Periode 2013-2017.
- Ha.3: SiLPA berdampak secara parsial atas Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Periode 2013-2017.
- Ha.4: Belanja Modal berdampak secara parsial atas Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Periode 2013-2017.
- Ha.5: PAD,DAK,SiLPA, dan Belanja Modal sebagai variabel Pemoderasi berpengaruh secara simultan atas Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Periode 2013-2017.